

Judul : **Pengkajian Dampak Pembangunan Perkebunan terhadap Daerah Aliran Sungai Se-Provinsi Riau**
Tahun : **2008**
Penulis : **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau**
Kategori : **Lingkungan Hidup**

Penelitian “Pengkajian Dampak Pembangunan Perkebunan terhadap Daerah Aliran Sungai Se-Provinsi Riau” dilaksanakan untuk mengkaji dampak perkembangan perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya erosi, sedimentasi, kekritisan lahan, dan kondisi lingkungan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2008 selama 120 hari dengan cakupan empat DAS utama, yaitu DAS Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri.

Kajian dilakukan pada 13 lokasi sampel dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik, penggunaan dan penutupan lahan, hidrologi, kondisi perkebunan, serta aspek sosial ekonomi masyarakat. Analisis dampak diarahkan untuk mengetahui keterkaitan pembangunan perkebunan dengan perubahan kondisi DAS, terutama tingkat bahaya erosi, sedimentasi, lahan kritis, daerah resapan, dan kesesuaian lahan.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi lahan DAS di Riau didominasi kategori agak kritis sebesar 48,59%, diikuti kritis 26,09%, potensial kritis 15,39%, tidak kritis 4,79%, dan sangat kritis 1,23%. Dampak pembangunan perkebunan terhadap erosi dan sedimentasi menunjukkan tren peningkatan selama 2001–2008. Tingkat erosi yang pada 2001 secara umum berada pada kategori ringan (15–60 ton/ha/tahun) meningkat menjadi kategori sedang pada 2008 (60–180 ton/ha/tahun).

Faktor utama yang memengaruhi erosi dan sedimentasi adalah curah hujan tinggi, kepekaan jenis tanah, serta perubahan penutupan dan pemanfaatan lahan. Karena curah hujan tidak dapat dikendalikan, pengelolaan tutupan lahan menjadi faktor penting dalam menekan dampak pembangunan perkebunan terhadap DAS. Salah satu tindakan yang direkomendasikan adalah mempertahankan atau menanam vegetasi bawah pada areal perkebunan untuk mengurangi energi kinetik hujan dan erosi tanah.

Penelitian merekomendasikan penyusunan aturan konservasi tanah pada lahan perkebunan, pemberian izin pembangunan perkebunan secara lebih selektif sesuai karakteristik lahan dan tanaman, serta penerapan pengelolaan lingkungan dengan mengalokasikan sebagian manfaat ekonomi perkebunan untuk pemulihan dan pengelolaan lingkungan (payment for environmental services).